



WALIKOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6998/A5/HK/.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023 masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
9. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Surat Keterangan Kelulusan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan yang memuat keterangan tentang kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan nilai serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Seleksi adalah penyaringan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan guna menjaring peserta didik sesuai kuota pada masing-masing sekolah, yang dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
16. Daya tampung adalah ketersediaan satuan pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombel yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Zonasi adalah pengaturan dan skor jarak radius domisili peserta didik berdasarkan data pada kartu keluarga yang digunakan sebagai dasar dalam penerimaan peserta didik baru.
18. Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Prestasi adalah kemampuan hasil belajar dan/atau capaian kejuaraan dan/atau penghargaan yang diraih calon peserta didik dalam perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kota/kabupaten yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat.
20. Mutasi kedinasan adalah perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas; dan
 - b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. jumlah rombongan belajar dan peserta didik;
- f. biaya;
- g. larangan;
- h. pelaporan, pengawasan dan pengaduan;
- i. waktu PPDB;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB IV ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- b. objektif, artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan dan tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat social ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB V TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta layanan usia didik Taman Kanak-kanak sebagai berikut:

- a. berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun, untuk kelompok A;

- b. berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun, untuk kelompok B;
- c. memiliki Kartu Keluarga (KK);
- d. memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang dibuktikan dengan:
 - 1. Ijazah;
 - 2. surat tanda tamat belajar;
 - 3. surat keterangan kelulusan; atau
 - 4. bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri yang akan masuk jenjang SD atau SMP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. rekomendasi izin belajar dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta Didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon peserta didik wajib melengkapi dan mengunggah:
 - a. hasil pindai asli kartu keluarga dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur zonasi;
 - b. hasil pindai asli kartu keluarga, Kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH atau kartu sejenis, dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur afirmasi;
 - c. hasil pindai asli kartu keluarga dan piagam-piagam prestasi dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur prestasi; dan
 - d. hasil pindai asli SKK dan surat keterangan mutasi kedinasan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali.
- (2) Persyaratan administrasi lainnya dilengkapi setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Prestasi; dan
 - d. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

untuk satuan pendidikan SD dari daya tampung sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk satuan pendidikan SD dari daya tampung sekolah, dan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk satuan pendidikan SMP dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk satuan pendidikan SMP.
- (5) Jalur perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah baik untuk satuan pendidikan SD maupun untuk satuan pendidikan SMP.
- (6) Jika kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota ditambahkan ke jalur zonasi.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah berasrama; dan/atau
 - c. sekolah di zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.

- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (3) Zonasi PPDB ditetapkan berdasarkan pembagian kelompok jarak radius domisili peserta didik dan skor jarak radius domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju.
- (4) Skor zonasi menjadi dasar bagi satuan pendidikan dan perangkat daerah untuk menyeleksi penerimaan peserta didik, apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah.
- (5) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk satuan pendidikan SD dari daya tampung sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk satuan pendidikan SD dari daya tampung sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP dalam jalur zonasi, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Keadaaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan akibat calon peserta didik mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah di daerah yang sama dengan sekolah asal.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Jalur afirmasi dengan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditentukan berdasarkan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) PPDB jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik SD/MI yang akan melanjutkan ke satuan pendidikan SMP melalui bukti prestasi yang dicapai calon peserta didik baik prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai kelulusan SD/MI atau sederajat;
 - b. hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan lainnya di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat, paling rendah sebagai juara kesatu tingkat kota/kabupaten;

- (3) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diperuntukkan:
- a. 8 % (delapan persen) dari daya tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan nilai kelulusan SD/MI atau sederajat, dengan pengaturan:
 - a). 5% (lima persen) untuk calon peserta didik asal dalam daerah;
 - b). 3% (tiga persen) untuk calon peserta didik luar daerah;
 - c. 8% (delapan persen) dari daya tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat, dengan pengaturan:
 - a) 5% (lima persen) untuk calon peserta didik asal dalam daerah;
 - b) 3% (tiga persen) untuk calon peserta didik luar daerah;

Pasal 18

- (1) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang nonakademik paling kurang adalah juara kesatu prestasi perorangan pada lomba tingkat kabupaten/kota, bukan prestasi beregu atau kelompok.
- (3) Prestasi nonakademik yang dinilai adalah prestasi di bidang olahraga, kesenian, keagamaan atau prestasi bidang kepramukaan dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau induk organisasi olahraga, seni dan keagamaan lainnya seperti, KSN, KOSN, FLSSN, POPWIL, POPDA, POPNAS, PON, MTQ/STQ/LPTQ/lomba keagamaan, dan Pramuka Garuda, pada tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.

Paragraf 5 Jalur Mutasi Kedinasan Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Jalur Mutasi Kedinasan dengan kuota paling banyak 5 (lima) % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar daerah.
- (2) Mutasi Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Mutasi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas adalah mutasi kedinasan orang tua yang bekerja di lingkungan pemerintah, TNI/POLRI, instansi pemerintah, lembaga, kantor atau perusahaan pemerintah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman;
 - e. penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran, yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, atau jalur mutasi kedinasan;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam daftar pokok kependidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.

- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) PPDB pada jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 22

- (1) Untuk jenjang SD dan SMP, seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung yang dimiliki pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Khusus untuk jenjang SD, apabila jumlah pendaftar dalam seleksi pelaksanaan PPDB melebihi kapasitas daya tampung, maka mengutamakan yang memiliki surat keterangan dari lembaga PAUD.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, afirmasi dan jalur mutasi kedinasan.
- (2) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jika karena suatu keadaan kuota jalur afirmasi dan jalur mutasi kedinasan tidak terisi, maka sisa kuota PPDB dialihkan ke kuota jalur zonasi.

- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (7) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi dan skor zonasi yang telah ditetapkan.
- (8) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi dan skor zonasi yang telah ditetapkan.
- (9) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (10) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi kedinasan, dengan mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika pada satuan pendidikan jumlah pendaftar telah melebihi daya tampung, dan memiliki skor zonasi yang sama, maka calon peserta didik terakhir yang diterima ditetapkan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai kelulusan lebih tinggi.
- (4) Jika nilai kelulusan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

Bagian Keenam Pengumuman Diterima, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
- (2) Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada setiap satuan pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan mencantumkan standar nilai kelulusan (*passing grade*).

Pasal 26

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB VI PANITIA PPDB

Pasal 27

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Pembentukan panitia PPDB tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar dan dikoordinasikan dengan kepala unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (5) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama dan dikoordinasikan dengan kepala unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 28

- (1) Panitia PPDB tingkat daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan fasilitas PPDB;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melakukan seleksi calon peserta didik baru;
 - d. menetapkan calon peserta didik baru yang diterima;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
 - g. melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada Kepala Perangkat Daerah melalui kepala unit kerja terkait.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah atau dari luar daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen berupa:
 1. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 2. surat keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen berupa:
 1. Salinan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang

- bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 3. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.

BAB VIII JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Jumlah rombongan belajar pada Taman Kanak-Kanak pada setiap rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) orang peserta didik.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SD untuk setiap tingkatan kelas, paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (3) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP, untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah rombongan

belajar dan jumlah peserta didik maksimal untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatika jumlah ruangan belajar yang tersedia.

BAB IX BIAYA

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dipungut biaya.

BAB X LARANGAN

Pasal 34

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
 1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan
 2. tidak memiliki lahan;
- b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- c. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- d. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan atau mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

BAB XII
WAKTU PPDB

Pasal 36

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 37

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila :
 - a. memalsukan data dalam dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili;
 - b. memalsukan sertifikat kejuaraan, bukti prestasi lainnya;
 - c. memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas;
 - d. memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. memalsukan surat keterangan mutasi kedinasan.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada dokumen atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 MEI 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KOTA
TASIKMALAYA

ZONASI DAN SKOR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)	
100	0	140	0	0,14	50	7001	7140	7,001	7,14
99	141	280	0,141	0,28	49	7141	7280	7,141	7,28
98	281	420	0,281	0,42	48	7281	7420	7,281	7,42
97	421	560	0,421	0,56	47	7421	7560	7,421	7,56
96	561	700	0,561	0,7	46	7561	7700	7,561	7,7
95	701	840	0,701	0,84	45	7701	7840	7,701	7,84
94	841	980	0,841	0,98	44	7841	7980	7,841	7,98
93	981	1120	0,981	1,12	43	7981	8120	7,981	8,12
92	1121	1260	1,121	1,26	42	8121	8260	8,121	8,26
91	1261	1400	1,261	1,4	41	8261	8400	8,261	8,4
90	1401	1540	1,401	1,54	40	8401	8540	8,401	8,54
89	1541	1680	1,541	1,68	39	8541	8680	8,541	8,68
88	1681	1820	1,681	1,82	38	8681	8820	8,681	8,82
87	1821	1960	1,821	1,96	37	8821	8960	8,821	8,96
86	1961	2100	1,961	2,1	36	8961	9100	8,961	9,1
85	2101	2240	2,101	2,24	35	9101	9240	9,101	9,24
84	2241	2380	2,241	2,38	34	9241	9380	9,241	9,38
83	2381	2520	2,381	2,52	33	9381	9520	9,381	9,52
82	2521	2660	2,521	2,66	32	9521	9660	9,521	9,66
81	2661	2800	2,661	2,8	31	9661	9800	9,661	9,8
80	2801	2940	2,801	2,94	30	9801	9940	9,801	9,94
79	2941	3080	2,941	3,08	29	9941	10080	9,941	10,08
78	3081	3220	3,081	3,22	28	10081	10220	10,081	10,22
77	3221	3360	3,221	3,36	27	10221	10360	10,221	10,36
76	3361	3500	3,361	3,5	26	10361	10500	10,361	10,5
75	3501	3640	3,501	3,64	25	10501	10640	10,501	10,64
74	3641	3780	3,641	3,78	24	10641	10780	10,641	10,78
73	3781	3920	3,781	3,92	23	10781	10920	10,781	10,92
72	3921	4060	3,921	4,06	22	10921	11060	10,921	11,06
71	4061	4200	4,061	4,2	21	11061	11200	11,061	11,2

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)	
70	4201	4340	4,201	4,34	20	11201	11340	11,201	11,34
69	4341	4480	4,341	4,48	19	11341	11480	11,341	11,48
68	4481	4620	4,481	4,62	18	11481	11620	11,481	11,62
67	4621	4760	4,621	4,76	17	11621	11760	11,621	11,76
66	4761	4900	4,761	4,9	16	11761	11900	11,761	11,9
65	4901	5040	4,901	5,04	15	11901	12040	11,901	12,04
64	5041	5180	5,041	5,18	14	12041	12180	12,041	12,18
63	5181	5320	5,181	5,32	13	12181	12320	12,181	12,32
62	5321	5460	5,321	5,46	12	12321	12460	12,321	12,46
61	5461	5600	5,461	5,6	11	12461	12600	12,461	12,6
60	5601	5740	5,601	5,74	10	12601	12740	12,601	12,74
59	5741	5880	5,741	5,88	9	12741	12880	12,741	12,88
58	5881	6020	5,881	6,02	8	12881	13020	12,881	13,02
57	6021	6160	6,021	6,16	7	13021	13160	13,021	13,16
56	6161	6300	6,161	6,3	6	13161	13300	13,161	13,3
55	6301	6440	6,301	6,44	5	13301	13440	13,301	13,44
54	6441	6580	6,441	6,58	4	13441	13580	13,441	13,58
53	6581	6720	6,581	6,72	3	13581	13720	13,581	13,72
52	6721	6860	6,721	6,86	2	13721	13860	13,721	13,86
51	6861	7000	6,861	7	1	13861	14000	13,861	14

Keterangan:

1. Skor zonasi PPDB di Kota Tasikmalaya merupakan zonasi yang bersifat terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada semua warga Kota Tasikmalaya dan/atau warga luar Kota Tasikmalaya yang berada di wilayah perbatasan, memilih dan mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju, dengan mengutamakan sekolah pilihan adalah sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik sesuai dokumen yang tertera dalam kartu keluarga;
2. Jika calon peserta didik yang mendaftar melebihi dari daya tampung Satuan Pendidikan, penetapan peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan peringkat skor zonasi.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF